

Dukung Tindaklanjuti Temuan BPK

SANGGAU--Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Andreas Nyas, meminta agar 11 temuan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar dapat ditindaklanjuti.

"Apapun hasilnya, temuan BPK tersebut hendaknya ditindaklanjuti. Jika ada kekurangan dibenarkan, dan jika ada kesalahan dipertanggungjawabkan," ujar Nyas kepada wartawan belum lama ini.

Bahkan, lanjut legislator PDI Perjuangan tersebut, bahwa tidak menutup kemungkinan DPRD Sanggau membentuk Panitia Kerja (Panja) terkait 11 temuan BPK tersebut, jika tidak ada kejelasan terhadap penyelesaian temuan-temuan tersebut. Nyas meminta kepada Pemkab Sanggau untuk menindaklanjutinya, apalagi karena berpotensi merugikan keuangan negara.

"Ada beberapa temuan yang cukup penting dan krusial untuk ditindaklanjuti, kalau perlu diprioritaskan. Yakni soal pertanggungjawaban bantuan sosial senilai Rp1,4 miliar, soal penataan asset daerah yang belum genah dan lainnya," imbuhnya.

Di tempat terpisah, hal senada juga disampaikan oeh politisi PAN, Nasri Alisan ST yang juga mendukung soal pentingnya menindaklanjuti, atau memfollow up hasil temuan dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah.

"Memang sudah seharusnya demikian, jangan ada

Dukung Tindaklanjuti ...

Sambungan dari halaman 24

yang ditutup-tutupi. Sehingga tidak ada lagi kecurigaan-kecurigaan. Dokumen laporan pemeriksaan BPK adalah laporan kinerja kepala daerah serta kepatuhan kepala daerah dalam melaksanakan peraturan dan undang-undang. Dari situ, nantinya akan diketahui apakah terjadi pelanggaran atau penyelewengan, maupun telah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Karenanya masyarakat harus mengetahui hal itu, supaya dapat bersama-sama melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya," tukas Nasri. Nasri juga berharap kepada aparat penegak hukum supaya proaktif dalam upaya mengungkap kasus-kasus dugaan korupsi, maupun indikasi penyalahgunaan wewenang yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintahan di daerah ini. (nto)